

RINGKASAN EKSEKUTIF

SURVEI BANTUAN SOSIAL

Sejak tahun 2020 Pandemi Covid-19 telah berdampak buruk di seluruh dunia termasuk Indonesia. Pandemi ini berdampak pada berbagai sektor seperti sektor ekonomi dan sosial. Pandemi ini berdampak pada pendapatan mulai dari perusahaan besar hingga pedagang kecil. Pandemi ini juga menimbulkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Melihat dampak sosial dan ekonomi yang muncul, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan Bantuan Sosial.

Bantuan Sosial merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia telah melakukan survei untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan penyaluran, hambatan dan penggunaan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak pandemi ini. Survei ini juga dirancang untuk melihat apakah penerima bantuan sudah tepat sasaran atau tidak, baik dari segi penerimaan maupun pemanfaatannya.

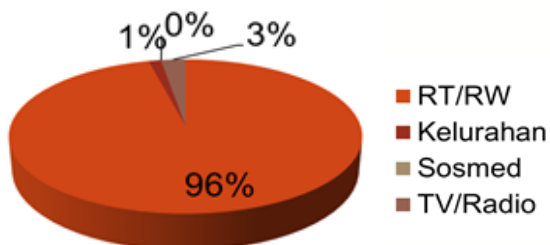


Survei dilaksanakan tanggal 3 sampai 10 Februari 2021 di Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Respondennya ada 79 orang dipilih secara acak yang mana 99% Respondennya merupakan penerima Bansos dan 92% pendapatan Respondennya terpengaruh akibat pandemi Covid-19.

KRITERIA RESPONDEN

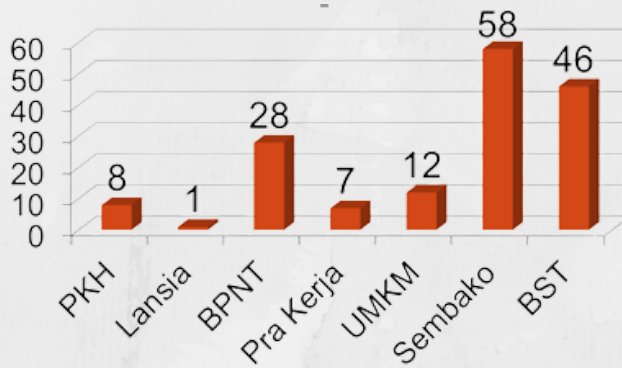
- **Usia**
 - 17-25 Tahun sebesar 6%
 - 25-30 Tahun sebesar 9%
 - 30-40 Tahun sebesar 23%
 - > 40 Tahun sebesar 62%
- **Jenis Kalamain**
 - Laki-Laki sebesar 42%
 - Perempuan sebesar 58%
- **Pendidikan**
 - SD sebesar 28%
 - SMP sebesar 21%
 - SMA sebesar 48%
 - S1 sebesar 3%
- **Pekerjaan**
 - Pekerja 18%
 - Wiraswasta 42%
 - Tidak Kerja/IRT 40%
- **Penghasilan Perbulan**
 - <500.000 sebesar 28%
 - <1 Juta sebesar 27%
 - >1 Juta Sebesar 45%

INFORMASI MENGENAI BANSOS DIKETAHUI DARIMANA



Informasi tentang Bansos oleh Responden diperoleh paling besar dari RT/RW sebesar 96% dan paling kecil dari Sosial Media sebesar 0%. Informasi lainnya seperti dari TV/Radio sebesar 3% dan terakhir dari Kelurahan sebesar 1%.

JENIS BANSOS YANG DITERIMA RESPONDEN



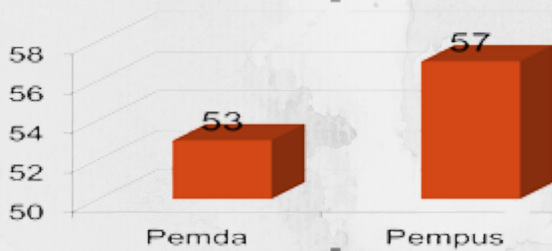
Keterangan

PKH : Program Keluarga Harapan

UMKM : Usaha Mikro Kecil Menengah

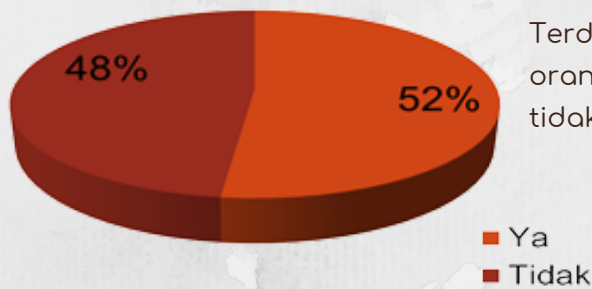
BST : Bantuan Sosial Tunai

PEMBERI BANSOS



Terdapat 53 orang dari Responden yang memperoleh Bansos dari Pemerintah Daerah dan 57 dari Pemerintah Pusat

- Terdapat masyarakat yang seharusnya menerima Bansos namun pada kenyataan tidak mendapatkan bantuan.



Terdapat 52% dari Responden yang mengatakan bahwa ada orang atau keluarga yang layak mendapat Bansos tetapi tidak menerima Bansos tersebut.

Rekomendasi:

- Perlu adanya pemutahiran data penerima dan/atau masyarakat kategori miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru.
- Pemerintah harus memperluas jangkauan bantuan untuk masyarakat yang terdampak covid-19 yang membutuhkan bantuan secara nyata dari pemerintah pusat maupun daerah.
- Pemerintah harus melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan bantuan sosial kepada masyarakat.

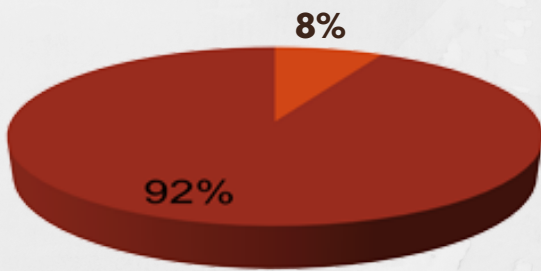
- Ditemukan adanya suami dan istri dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang mendapatkan Bansos.

Berdasarkan wawancara beberapa orang bahwa ada yang mendapat suami dan istri dalam satu Kartu Keluarga (KK) mendapatkan Bansos

Rekomendasi:

- Perlu adanya pemutahiran data penerima dan/atau masyarakat kategori miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru.
- Pemerintah harus melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan Bantuan Sosial kepada masyarakat.

■ **Terjadinya pelanggaran atas penerimaan Bansos berupa uang Rp 5000 - Rp 50.000 atau potongan barang Bansos**

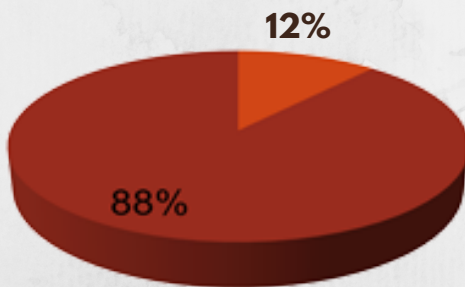


Ada sebesar 8% dari Responden yang menyebutkan bahwa ada pemotongan dalam bentuk uang ataupun barang atas penerimaan Bansos yang mana seharusnya tidak ada pemotongan Bansos dalam bentuk apapun.

Rekomendasi:

- Pemerintah harus melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan Bantuan Sosial kepada masyarakat.
- Perlu penyusunan standar penganggaran yang tepat agar menciptakan transparansi dan efektivitas penggunaan dana dari negara.

■ **Ditemukannya ada yang menjual kembali Bansos, yang berbentuk barang, untuk mendapatkan uang.**

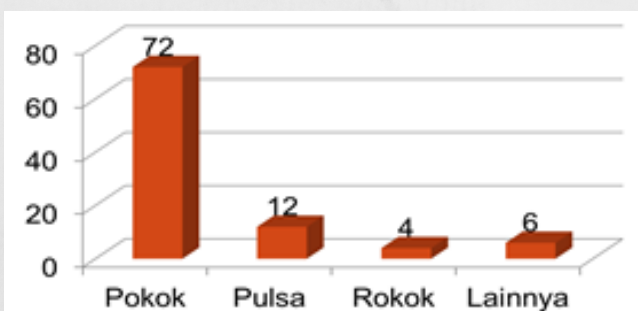


Sebesar 12% dari Responden mengatakan pernah menjual Bansos, yang berbentuk barang, untuk mendapatkan uang.

Rekomendasi:

Pemerintah lokal dan masyarakat harus mampu mendapat gambaran pemahaman terkait penggunaan dana Bantuan Sosial yang diberikan pemerintah

■ **Ditemukan adanya penggunaan dana BST yang kurang tepat seperti untuk belanja pulsa dan rokok**

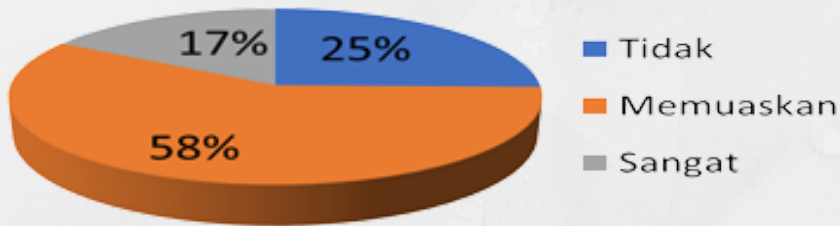


Ada penggunaan Bansos dari Responden yang kurang tepat, yaitu ada 16 Responden yang menggunakan Bansos untuk membeli Pulsa atau Rokok.

Rekomendasi:

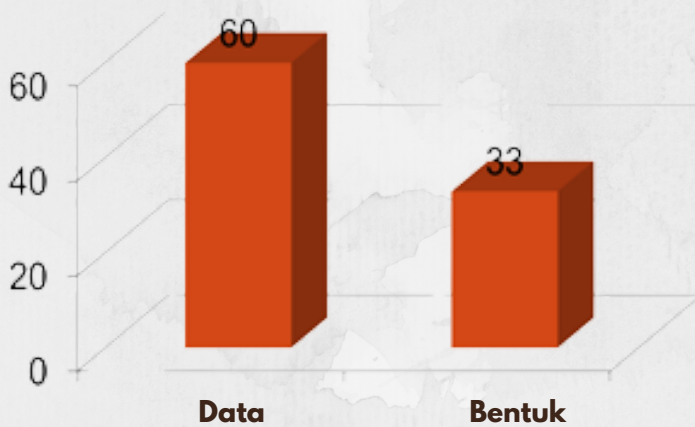
- Pemerintah lokal dan masyarakat harus mampu mendapat gambaran pemahaman terkait penggunaan dana Bantuan Sosial yang diberikan pemerintah.
- perlu penyusunan standar penganggaran yang tepat agar menciptakan transparansi dan efektivitas penggunaan dana dari negara.

■ **Tingkat Kepuasan Responden yang mendapat Bansos secara umum**



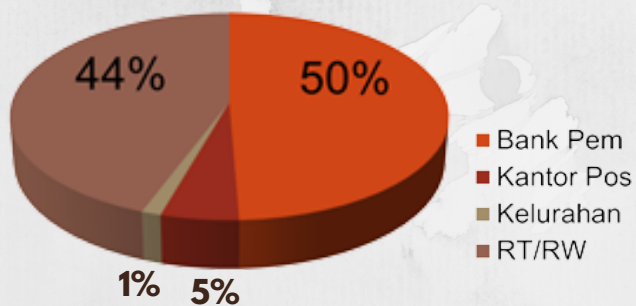
Secara umum terdapat 25% Reponden yang ridak puas terhadap Bansos yang diterima.

■ **Usulan Perbaikan Bansos**



Sebanyak 60 orang mengatakan perlu perbaikan pada data penerima Bansos dan 33 orang mengatakan perlu perbaikan dalam bentuk Bansosnya.

■ **Usulan Penyaluran Bansos**



Sebesar 50% Responden memilih Bank Pemerintah untuk penyaluran Bansos, ada sebanyak 44% memillih penyaluran melalui RT/RW, sebesar 5% memilih Kanor Pos dan sebanyak 1% memilih penyaluran melalui Kelurahan.

Perkumpulan Lembaga Forum Warga Kota Indonesia adalah lembaga independen yang bekerja dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai negara demokratis.

Perkumpulan ini bentuk perjuangan bersama warga untuk mengangkat dan membuka fakta-fakta penindasan terhadap kaum miskin. Konsistensi dalam melakukan advokasi bersifat multiplaying effect yang berawal dari Jakarta dan berdampak positif di Indonesia.

Kami memperjuangkan Hak-hak masyarakat, yaitu: Hak Hidup, Hak Berorganisasi, Hak atas Pemukiman, Hak atas Kesehatan, Hak atas Bekerja, Hak atas Pendidikan, Hak atas Lingkungan Hidup, Hak atas pelayanan Publik, Hak Anak dan Perempuan, Pengendalian Tembakau.